

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim*, Bandung, 2014.
- Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Ghalia, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- _____, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun I I, November 2004.
- Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arie, *Berapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta Kencana, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 2002.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Etty Ucu Rihayanti, *Upaya Hukum dari Korban Berupa Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas traumanegara, Jakarta, 1999.

- Del Vasechio dikutip A.Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, PT Ghalia Indonesia, 1994.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, penuntut umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007.
- Hartono, *Penyidik dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Acara pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Jimly Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <http://www.docudesk.com>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2016, pukul 14:51 Wib.
- Lobby Looqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Detacom, September, Jakarta 2002.
- _____, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusiadalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 23
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menenmpuh Upaya Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.33.
- Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Cet. 1 Jakarta, 1994, hlm. 25
- Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia Jakarta, 1987.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga. Njakarta. 1980.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1970.
- Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- _____, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Kontek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PT ERESKO, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engelian R. Palandeng dan Johny Lumolos. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta , 2010.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.
- Wahmuji, *Perihal Kejahat dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indoneesia No. 2 Tahun 2002.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

3. Internet

<http://www.beritasatu.com/nasional/269629-putusan-mk-dinilai-bebani-sistem-peradilan-pidana.html>, diakses pada tanggal. 26, April 2016, pukul:09:51

<http://www.suarakarya.id/2015/10/02/pergeseran-fungsi-hakim-praperadilan.html>, diakses pada tanggal. 26, April 2016, pukul:11:31

<http://jurnal123.com/2015/01/praperadilan-tidak-bisa-membatalkan-status-tersangka/>, diakses tanggal 21 Juni 2016, Pukul 13:30 wib, artikel yang ditulis oleh Admin Jurnal 123, berjudul “Praperadilan Tidak Bisa Membatalkan Status Tersangka”, dipublikasikan di website “Jurnal 123” Tanggal 31 Januari 2015.